

PARLEMENTARIA

Percepatan Digitalisasi Layanan Pemda

KOMISI I
Sikap Tegas
atas Serangan
Israel ke Qatar

KOMISI II
Optimalkan
Anggaran Pemda
dan Perbatasan

Nomor 1361/III/IX/2025 September 2025



9 772614 339005





FOTO: RDN/PDT

Ketua Tim KUNker Komisi II DPR RI, Mohammad Toha saat memimpin rombongan Komisi II ke MPP Kabupaten Semarang, Jateng, Senin (16/9/2025).

Percepatan Digitalisasi Layanan Pemda

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, memimpin rombongan Komisi II ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Semarang di Kecamatan Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah (pemda) guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

“Di Provinsi Jawa Tengah semua kabupaten/kota sudah memiliki Mall Pelayanan Publik. Namun,

MPP Kabupaten Semarang ini berhasil menempati peringkat ke-9 MPP Prima secara nasional di 2024, artinya sudah bisa menjadi percontohan,” ujar Toha kepada **Parlementaria**, usai pertemuan, Senin (16/9).

MPP Kabupaten Semarang menghadirkan 25 institusi dengan total 124 jenis layanan, terdiri atas instansi vertikal, perangkat daerah, hingga badan usaha publik. Diantaranya layanan dari Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor ATR/BPN, Kantor Pajak Pratama, Kementerian Agama, hingga UPPD Samsat. Selain itu juga tersedia layanan dari BPJS

Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng, dan Bank BRI.

Menurut Toha, pelayanan di MPP Kabupaten Semarang berjalan efektif, efisien, dan transparan karena sudah berbasis digital. Namun ia mencatat masih ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan server agar mampu menampung lebih banyak data sekaligus menjaga keamanan dari potensi peretasan digital. Selain itu, tata ruang gedung MPP juga perlu terus dibenahi agar pelayanan antarinstansi lebih tertata dengan baik. **— rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sikap Tegas atas Serangan Israel ke Qatar



Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Markas Brigade Kavaleri I/Tank Limpung Alugoro di Tangerang Selatan, Kamis (11/9/2025).

Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengecam keras serangan Israel terhadap Qatar yang dinilai telah melanggar kedaulatan sebuah negara sekaligus mencederai upaya perdamaian dunia. Menurutnya, Qatar selama ini dikenal sebagai pelopor dialog dan rekonsiliasi, sehingga tindakan Israel sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Syahrul Aidi menegaskan bahwa Israel merupakan ancaman nyata bagi perdamaian global. "Selama ini Israel selalu lolos dari hukuman karena dilindungi Amerika. Padahal, perlindungan itu justru meruntuhkan wibawa Amerika sendiri," ujarnya, di Tangerang Selatan, Kamis (11/9).

Lebih jauh, Syahrul Aidi menyebut bahwa Israel tidak menghormati upaya perdamaian yang dibangun Qatar dan negara-negara lain. Serangan ini, kata dia, menunjukkan sikap Israel yang

tidak memiliki logika hubungan antarnegara serta mengabaikan prinsip kedaulatan yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, komunitas internasional perlu lebih berani mengambil sikap. Ia menilai sejumlah negara sudah mulai menunjukkan kesadaran untuk menekan Israel, dan langkah ini harus diperluas agar memberikan efek jera.

Untuk itu, DPR RI menyerukan agar dunia internasional segera menjatuhkan sanksi tegas berupa embargo, blokade, dan tekanan ekonomi terhadap Israel. Menurut Syahrul Aidi, hanya dengan langkah bersama tersebut perdamaian dunia dapat diwujudkan, sekaligus menjaga martabat kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa-bangsa. **gys/aha**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danurinto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrul, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moenponi, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Sud Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Optimalkan Anggaran Pemda dan Perbatasan



Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, serta DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus memberikan pendapat tentang optimalisasi pagu anggaran dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, serta DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Deddy menekankan pentingnya kepastian terkait rencana efisiensi anggaran sebesar Rp269 triliun. Menurutnya, jika rencana itu tidak jadi dibatalkan, maka hal tersebut akan sangat membantu perekonomian masyarakat di daerah sekaligus mengurangi potensi keresahan publik.

“Kalau betul tidak dipotong, kita bisa bernafas lega. Itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan juga menekan kemungkinan kemarahan publik seperti waktu-waktu lalu,” ujar Deddy.

Ia juga menyoroti kenaikan yang cukup signifikan pada anggaran Kementerian ATR/BPN, dari Rp4,4 triliun menjadi Rp9,4 triliun. Deddy meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diperkuat khususnya di daerah pemilihannya, serta memastikan tindak lanjut dari sosialisasi program strategis pertanahan.

Selain itu, ia mengingatkan Kemendagri agar benar-benar memanfaatkan kenaikan anggaran dari Rp2 triliun menjadi Rp7 triliun.

Menurutnya, program pembinaan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) dan desa harus konkret, tidak hanya berupa seremonial, agar daerah dengan fiskal lemah bisa terdorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Deddy juga menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dianggap perlu menjadi simpul koordinasi lintas kementerian, sehingga pembangunan perbatasan tidak lagi terpinggirkan. Selanjutnya Deddy membahas tentang dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh, ia meminta agar pemerintah memastikan anggaran tersebut tidak dipangkas demi menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

tsy,gal/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tindak Tegas Tambang Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Distrik Wasiwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Menurutnya, persoalan ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu sektor pertanian, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Machfud dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari, Slamet Riyadi, dan tokoh masyarakat Banny Daud Mansaburi. Rapat tersebut membahas pengaduan masyarakat terkait maraknya tambang ilegal di wilayah tersebut.

“Dampak kerusakan yang sangat luar biasa berakibat pada pertanian yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan lebih

luas lagi, akhirnya mengganggu kehidupan masyarakat sana lebih luas,” tegas Machfud di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Mantan Kapolda Jawa Timur itu menilai penanganan illegal mining tidak cukup hanya menasar tambang tanpa izin, tetapi juga menyentuh praktik yang tampak legal di dokumen, namun menyimpang di lapangan.

“Polisi yang hebat kalau mampu menangani kasus yang dalam sisi

dokumennya legal, tapi kita bisa membuktikan ketidaklegalan biar melakukan aktivitas penambang. Itu baru pintar,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Machfud juga menyoroti adanya keterlibatan pihak-pihak luar Papua dalam praktik tambang ilegal, termasuk alur distribusi hasil tambang ke Makassar dan Surabaya. Ia mendesak aparat kepolisian untuk menutup jalur distribusi logistik yang menopang aktivitas ilegal tersebut.

Lebih jauh, Machfud mendorong keterlibatan pemerintah pusat dan Satgas khusus untuk membantu Polda Papua Barat. Ia mengingatkan, skala persoalan tambang ilegal di Papua Barat tidak bisa ditangani hanya oleh aparat daerah. — **hal/rdn**

Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Papua Barat, Bupati Manokwari Slamet Riyadi, serta tokoh adat Banny Daud Mansaburi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).



FOTO: DEP/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kepentingan Nelayan di Atas Pengusaha

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti persoalan pembangunan pagar beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Menurutnya, kepentingan nelayan kecil harus diutamakan

dibandingkan kepentingan pengusaha atau negara. Hal itu disampaikan Riyono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Riyono mengingatkan bahwa sesuai PP Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 10, terdapat delapan syarat sebelum terbitnya izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Ia menekankan, jangan sampai pembangunan pagar beton menimbulkan keresahan di kalangan nelayan.

“Akses nelayan kecil wajib ada di daerah penangkapan. Walaupun pagar beton di laut itu digunakan untuk kepentingan pelabuhan atau kepentingan lain, kepentingan nelayan harus tetap di atas segalanya,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.

Ia meminta KKP memastikan kondisi fisik pagar beton tersebut, sekaligus memberi penjelasan faktual mengenai izin yang telah diterbitkan. Riyono menekankan, KKPRL merupakan izin dasar yang wajib dimiliki setiap orang atau badan usaha yang ingin melakukan kegiatan menetap di ruang laut, termasuk untuk infrastruktur produksi, pipa, maupun kabel bawah laut.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas

Pagar beton di laut itu digunakan untuk kepentingan pelabuhan atau kepentingan lain, kepentingan nelayan harus tetap di atas segalanya,

Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menyatakan akan memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyampaikan pihaknya akan segera memanggil pelaku usaha dan nelayan untuk membahas formulasi kompensasi tersebut. **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: OJI/PDT



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I Kemenhub di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi nasional, khususnya sektor pelayaran, serta perlunya penetapan prioritas penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2026. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I Kemenhub, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Lasarus mengungkapkan, Kemenhub memperoleh tambahan anggaran dari Rp24,40 triliun menjadi Rp28,48 triliun sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026. Namun, alokasi ini masih jauh dari kebutuhan ideal Kemenhub yang mencapai Rp48,89 triliun.

“Keterbatasan fiskal ini menuntut Kemenhub benar-benar menetapkan prioritas, terutama untuk pembangunan konektivitas dan pemenuhan subsidi transportasi bagi masyarakat,” tegasnya.

Angkutan Massal Perkotaan Kunci Kurangi Kemacetan

Ia menyoroti sejumlah persoalan mendesak, mulai dari keselamatan pelayaran hingga konektivitas logistik nasional. “Ini penyakit menahun yang tidak pernah bisa diselesaikan. Kami titip pesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan, termasuk pengawasan KSOP di daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta Kemenhub memastikan subsidi transportasi tetap menjadi prioritas, khususnya untuk angkutan laut, udara, dan kereta api di wilayah timur Indonesia. Menurut Lasarus, layanan perintis tidak boleh terhenti karena

menyangkut distribusi barang dan mobilitas masyarakat di daerah terpencil. “Kalau subsidi perintis tidak terpenuhi, masyarakat di wilayah timur akan mengalami kesulitan luar biasa,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Lasarus juga menekankan perlunya percepatan penyediaan angkutan massal perkotaan sebagai solusi kemacetan dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, Komisi V DPR juga mendorong peningkatan pelayanan pelabuhan, terminal, dan bandara agar lebih nyaman bagi masyarakat, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perhubungan laut sesuai aturan perundang-undangan. **ssb/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Evaluasi SPM Tol Cipali

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kualitas layanan jalan tol, khususnya ruas Tol Cipali, sudah menjadi *perpetual complaints* atau keluhan yang terus berulang. Hal itu disampaikan Ridwan saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau ruas Tol Cipali, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (12/9).

Ridwan menyebut, sejumlah keluhan yang kerap muncul di antaranya kemacetan dan tingginya

angka kecelakaan, perkerasan jalan yang tidak rata bahkan berlubang hingga menimbulkan genangan air, kurangnya fasilitas keselamatan seperti rambu lalu lintas dan lampu jalan, lambatnya transaksi di gerbang tol, serta pertolongan pertama kecelakaan yang masih dinilai kurang cepat.

“Oleh karena itu, Komisi V membentuk Panja SPM Jalan Tol guna mengurai permasalahan dan mencari solusi terkait pemenuhan SPM Jalan Tol,” ungkap legislator dapil Sulawesi Tenggara tersebut.

Lebih lanjut, Ridwan menegaskan bahwa SPM Jalan Tol bukan hanya prosedur teknis,

melainkan instrumen negara untuk mengontrol akuntabilitas operator jalan tol, sekaligus menjadi alat evaluasi pelayanan publik berbasis keadilan.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pemenuhan SPM Jalan Tol oleh pengelola ruas Cipali. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kecelakaan dinilai masih cukup tinggi sehingga membutuhkan langkah korektif.

Daniel menyoroti pentingnya keberadaan *rumble strip* atau garis kejut di sepanjang tol. Menurutnya, beberapa titik garis kejut sudah tidak berfungsi maksimal untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi. Selain itu, Daniel juga menekankan perlunya peningkatan penerangan di jalur tol. — **vel/aha**



FOTO: VEL/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau ruas Tol Cipali, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (12/9/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terobosan Sinergi BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai rencana merger antara maskapai Pelita Air dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan langkah terobosan yang memperkuat sinergi antar-BUMN di sektor penerbangan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi upaya efisiensi, melainkan juga meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional yang sempat terpukul akibat pandemi COVID-19 dan tingginya beban utang Garuda Indonesia.

“Ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan pelayanan publik di sektor transportasi udara,” ujar Rivqy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta Sub Holding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/).

Diketahui, Garuda Indonesia tengah melanjutkan restrukturisasi keuangan setelah berhasil keluar dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2022 lalu. Sementara, Pelita Air yang berada di bawah naungan Pertamina, belakangan gencar memperluas rute penerbangan domestik dan diproyeksikan

menjadi mitra strategis untuk memperkuat jaringan Garuda.

Lebih lanjut, Rivqy menekankan, upaya merger tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan publik, terutama terkait ketersediaan layanan penerbangan yang terjangkau dan merata di seluruh Indonesia. “Sinergi ini jangan hanya fokus pada efisiensi bisnis, tapi juga memastikan layanan penerbangan

tetap bisa dinikmati masyarakat luas dengan standar keselamatan dan kenyamanan tinggi,” tegasnya.

Terakhir, Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan merger dua maskapai pelat merah ini akan menjadi ujian bagi Kementerian BUMN. Maka dari itu, ia mendorong agar konsolidasi perusahaan negara berjalan sesuai prinsip *good corporate governance*, efisiensi berkeadilan, serta berorientasi pada kemakmuran rakyat. — **um/rdn**

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri beserta Sub Holding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).



FOTO: FHN/PDT



Penggajian Kontributor RRI

Kondisi infrastruktur Radio Republik Indonesia (RRI) di Kalimantan Barat menjadi sorotan serius Komisi VII DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menilai banyak stasiun dan pemancar RRI di wilayah perbatasan yang sudah berusia tua dan harus segera

diperbarui agar bisa memberikan layanan siaran yang lebih baik kepada masyarakat.

“Stasiun yang sudah tua, pemancar di perbatasan yang dayanya kecil, dan peralatan yang usianya sudah lama harus segera diperbaharui. Ini yang akan kami dorong dalam pembahasan bersama Banggar,” kata Hendry

kepada **Parlementaria**, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/9).

Ia menambahkan bahwa salah satu kendala utama yang disampaikan pihak RRI adalah terkait status penggajian kontributor yang masih mengandalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, menurutnya, peran kontributor sangat penting sebagai ujung tombak dalam menyajikan berita dan program-program yang menyentuh masyarakat.

“Usulan yang sangat konkrit dari RRI adalah bagaimana pembiayaan kontributor ini bisa dialihkan ke rupiah murni, bukan PNBP. Hal ini akan kami perjuangkan dalam pembahasan di Banggar DPR RI,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, Hendry juga mengaitkan penguatan RRI dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau kita bicara ekonomi, RRI juga harus mengambil bagian dalam memberdayakan masyarakat melalui program-programnya. Dengan begitu, RRI bukan hanya lembaga penyiaran, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan ekonomi bangsa,” tandas Hendry.

eno/rdn

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief saat mengikuti pertemuan di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/9/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: ENO/PDT

Dorong PLUT Subang Jadi BLUD

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Subang. Menurutnya, PLUT perlu segera ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi juga berkembang sebagai sentra UMKM.

“Kalau sudah menjadi BLUD, PLUT Subang bukan sekadar pusat pelatihan, tetapi juga bisa membuka *counter* penjualan, memperkuat distribusi, hingga mendorong pemasaran produk UMKM baik *offline* maupun *online*. Dengan *packaging* yang bagus dan strategi pemasaran yang tepat, produk UMKM Subang bisa naik kelas bahkan menembus pasar global,” jelas Evita saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu, (17/09).

Ia juga menyoroti perlunya keberlanjutan pasokan untuk menjaga kepercayaan pasar ekspor. “Pemda harus menjamin kontinuitas produksi agar konsumen internasional tidak beralih ke negara lain,” imbuh Evita.

Senada, Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 84 ribu UMKM yang tersebar di Subang. Keberadaan UMKM tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

“PLUT Subang sudah berjalan sejak 2014. Awalnya didukung Kementerian, namun sejak 2019 sudah mandiri menggunakan APBD dengan tujuh konsultan yang membantu UMKM, mulai dari desain hingga pengembangan produk. Ke depan, kita sepakat PLUT perlu diperkuat dengan divisi pemasaran dan status kelembagaan BLUD,” ujar Agus.

Dengan dukungan DPR RI dan Pemda, PLUT Subang diharapkan dapat menjadi pusat UMKM yang semakin berdaya saing, sekaligus mengangkat produk unggulan daerah seperti kopi, nanas, dan manggis ke pasar ekspor yang lebih luas.

ndy/aha

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu, (17/09/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO : NDY/PDT

ODGJ di Sukabumi Perlu Perhatian Serius

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti tingginya

jumlah warga Kabupaten Sukabumi yang terindikasi mengalami gangguan jiwa. Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan sekitar 3.000 orang terindikasi ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), jumlah yang dianggap sangat memerlukan perhatian serius.

Dalam kunjungannya ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, pada Rabu (17/9), Abidin mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 160 ODGJ yang

ODGJ perlu dirawat dengan penuh perhatian. Saya melihat tadi bagaimana mereka diajak bergembira dengan bernyanyi, karena kalau tidak bahagia bisa memicu halusinasi. Hal-hal sederhana seperti ini sangat penting

ditangani oleh Kemensos melalui sentra tersebut. Sentra ini memiliki

cakupan kerja yang luas, meliputi sembilan wilayah di Jawa Barat hingga beberapa kabupaten di Sumatera Selatan.

“ODGJ perlu dirawat dengan penuh perhatian. Saya melihat tadi bagaimana mereka diajak bergembira dengan bernyanyi, karena kalau tidak bahagia bisa memicu halusinasi. Hal-hal sederhana seperti ini sangat penting,” ujarnya.

Abidin menekankan bahwa tugas pokok Kementerian Sosial untuk menangani masalah sosial harus tetap berjalan, meskipun ada tambahan tugas baru berupa pembangunan Sekolah Rakyat. Ia meminta agar anggaran untuk penanganan ODGJ tidak berkurang dan justru diperkuat.

“Kondisi ODGJ di Sukabumi ini harus ditangani secara terpadu, dengan dukungan dari pemerintah daerah, pusat, hingga DPR. Jangan sampai Sentra Phalamartha yang ada di sini tidak bisa menjangkau wilayah sekitarnya,” tegas Abidin.

eno/aha



FOTO: ENO/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Rabu (17/9/2025).

Pentingnya Pemenuhan Gizi Siswa Sekolah Rakyat



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025).

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9). Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyoroti sejumlah aspek, mulai dari fasilitas sekolah, pemenuhan gizi siswa, hingga mekanisme seleksi penerimaan peserta didik.

"Saya pikir ini sudah sangat bagus dan sangat memadai untuk sekolah rakyat yang diterima oleh anak-anak sekitar 141 siswa," ungkap Selly.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas secara maksimal untuk menunjang kualitas pendidikan sekaligus

membangun karakter moral dan spiritual siswa. Ia menambahkan bahwa aspek pemenuhan gizi yang diberikan kepada para siswa juga harus menjadi perhatian, tidak hanya kualitas tapi juga keseimbangan gizi karena memengaruhi kesehatan para siswa.

"Karena pada saat makanan dan gizi yang mereka terima tentu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dikhawatirkan nantinya akan juga berpengaruh terhadap kualitas kesehatan mereka," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Selly menekankan perlunya evaluasi terhadap kriteria penerimaan siswa SR di Banten. Tidak hanya mempertimbangkan data Desil, namun penyebaran penerimaan seharusnya

mempertimbangkan rata-rata lama sekolah di tiap daerah. Hal ini dikarenakan tingkat rata-rata lama bersekolah di setiap daerah berbeda, sehingga daerah yang memiliki tingkat lama bersekolah sangat rendah perlu menjadi prioritas pemerintah.

"Di luar itu juga yang paling krusial yang harus kita telusuri adalah berkaitan dengan apakah siswa-siswa tadi secara mohon maaf desil dan keluarga besar mereka sudah masuk dalam kategori keluarga yang terdata di dalam DTSEN. Karena setelah tadi kita perhatikan ada banyak sekali mereka yang ada di data dalam DTSEN tetapi selama ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah," tegasnya. **nap/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Masalah UMK Bukan Sekadar Angka

Penetapan upah minimum masih menyisakan persoalan kompleks dalam hubungan industrial di Indonesia. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa masalah UMK tidak semata-mata soal angka, melainkan menyangkut kesejahteraan pekerja, keberlanjutan usaha, hingga potensi konflik antara pekerja dan pemberi kerja.

“Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan industrial. Antara pekerja dan pemberi kerja mempunyai persamaan kepentingan yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak,” jelas Felly dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kantor Kabupaten Bandung Barat, Jumat (12/9).

Pemerintah, menurutnya, berupaya memberikan perlindungan dengan menetapkan upah minimum serta menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk memastikan kenaikan upah setiap tahun. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan agar dunia usaha tetap dapat berjalan dengan lancar, produktif, dan kompetitif.

Komponen kesejahteraan, tambah, tidak hanya berbentuk

upah, tetapi juga jaminan sosial, bonus, tunjangan hari raya, maupun fasilitas seperti perumahan, transportasi, tempat ibadah, kantin, pelatihan, dan rekreasi. Namun,

perbedaan pandangan mengenai nilai upah masih kerap memicu perselisihan.

Sebagai ilustrasi, Pemerintah Daerah Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp 3.736.741 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561.7/798-kesra/2024 yang mengacu pada Permenaker No.16 Tahun 2024. Kenaikan sebesar Rp 132.402 itu berlaku mulai 1 Januari 2025.

tn/aha

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam Kunjungan Kerja ke Kabupaten Bandung Barat, Jum'at (12/9/2025)



FOTO: TN/PDT



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini (tengah), saat memimpin kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gresik, Jumat (12/9/2025).

Apresiasi 60 Persen Tenaga Kerja Lokal di Gresik

Komisi IX DPR RI mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik yang mewajibkan perusahaan besar mempekerjakan 60% tenaga kerja dari Jawa Timur, dengan 25% di antaranya berasal dari Gresik. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam dunia industri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai kebijakan tersebut memberi harapan baru, khususnya bagi generasi muda. "Ini semua tergantung oleh kesiapan SDM di Gresik sendiri. Saya kira kebijakan ini sangat positif, memberikan angin segar untuk

anak muda. Tapi masalahnya apakah bisa memenuhi kuota yang diminta? Maka harus ada politeknik, agar perusahaan-perusahaan bisa langsung menyeleksi sesuai dengan kompetensi yang ada," ujarnya saat kunjungan kerja di Gresik, Jumat (12/9).

Menurut Yahya, keberadaan politeknik atau lembaga pendidikan vokasi akan memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Dengan begitu, kuota tenaga kerja lokal yang ditetapkan dapat benar-benar diisi oleh tenaga profesional yang sesuai dengan kualifikasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan

kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kualitas SDM. "Ada peraturan daerah di Gresik dimana 60% pegawai perusahaan harus berasal dari Jawa Timur, dengan rincian 35% warga Jatim dan 25% warga Gresik. Tentu presentase ini berisi orang-orang yang kompeten," jelasnya.

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gresik turut dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, serta mitra-mitra Komisi IX lainnya. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, sehingga mampu bersaing di tengah pertumbuhan industri yang pesat. **est/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, saat mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).

Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap potensi dan pembinaan cabang olahraga di Jawa Timur, terutama di Kota Surabaya.

Hal tersebut disampaikan Muslimin Bando usai mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bersama dengan pemangku kepentingan bidang olahraga, termasuk perwakilan KONI dan Kemenpora, yang membahas pengembangan olahraga di daerah, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9).

Politisi dari Dapil Sulawesi Selatan III ini turut menyoroti keberhasilan atlet disabilitas Jawa Timur yang baru-baru ini meraih gelar juara umum dalam sebuah kejuaraan nasional. Selain itu, atlet asal Madura, khususnya di cabang olahraga renang, juga dinilai

Potensi dan Pembinaan Olahraga

memiliki prestasi dan potensi yang luar biasa.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengembangan olahraga adalah keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia mendorong agar pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam pembinaan atlet, termasuk melibatkan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi.

“Dengan anggaran yang terbatas, perguruan tinggi di Jawa Timur tetap mampu

membina cabang olahraga dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Ini patut diapresiasi,”katanya.

Menanggapi Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, Muslimin berharap akan ada profesionalisme dan perhatian yang merata terhadap seluruh cabang olahraga. “Sebelumnya, perhatian banyak terfokus pada sepak bola. Namun saya yakin Menpora yang baru dapat membawa pembaruan dan penguatan pembinaan olahraga secara menyeluruh,” harapnya.

 **afr/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Terpinggirnnya PTS di Tengah Ekspansi PTN

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti ketimpangan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa. Menurutnya, semakin banyak jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat peluang PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil.

“Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi, tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat,” terang Fikri usai menghadiri pertemuan Panja

PTKL Komisi X DPR dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI beserta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/9).

Fikri mengungkapkan, banyak keluhan dari PTS yang merasa tersisih karena PTN membuka hingga empat kali jalur mandiri. Kondisi tersebut membuat kesempatan bagi PTS untuk menampung mahasiswa semakin berkurang.

“Pemerintah harus mencari skema yang adil agar peran PTS tetap diakui,” tegasnya.

Selain itu, Fikri juga menekankan perlunya keadilan dalam pemberian bantuan operasional perguruan tinggi. Jika selama ini terdapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), ia mendorong agar pemerintah juga mengkaji Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) untuk menjaga keseimbangan.

Politisi F-PKS ini juga menyinggung reposisi Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) agar tidak bersaing langsung dengan PTN dan PTS. Ia menilai PTKL sebaiknya berfokus pada program studi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian pengampunya. **nap/aha**

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, pertemuan Panja PTKL Komisi X DPR dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI beserta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO : NAP/PDT

Peluang Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menilai langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan uang pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan umum, mendapat dukungan banyak kalangan dan berpotensi mempercepat perputaran ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Dana tersebut antara lain berasal dari sisa anggaran lebih dan saldo lebih pembayaran anggaran. Jika ditempatkan di bank umum seperti deposito, bank akan memiliki keleluasaan untuk memanfaatkannya,” ujar Bertu Merlas dalam keterangannya pada *Parlementaria*, Senin (15/9).

Diketahui, ada enam bank milik pemerintah yang akan mendapatkan dana jumbo tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI Rabu (10/9) Menkeu Purbaya menilai salah satu seretnya pertumbuhan ekonomi karena pemerintah terlalu lambat membelanjakan

anggaran dan justru membiarkan dana mengendap di bank sentral. Akibatnya ekonomi masyarakat melambat karena perputaran uang di sistem perekonomian sangat ketat, bahkan negatif.

Bertu menjelaskan penempatan anggaran Rp200 triliun di perbankan akan membuka peluang penyaluran kredit kepada kalangan pengusaha, pelaku UMKM, hingga pihak-pihak yang membutuhkan modal usaha. Situasi ini akan membuka peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja sehingga

pada gilirannya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Politisi PKB ini berharap enam bank nasional yang menerima dana yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Nasional bisa memprioritaskan kredit bagi pelaku UMKM. Menurutnya dalam berbagai momentum perlambatan ekonomi, kalangan UMKM lah yang terbukti mampu bertahan dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendati demikian, Bertu mengingatkan agar Kementerian Keuangan mempunyai aturan ketat agar dana jumbo di perbankan ini tidak disalahgunakan. Salah satunya aturan agar penyaluran kredit perbankan dari dana tersebut diperuntukkan untuk investasi dalam negeri. **we/aha**

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO : DOK/PDT



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (11/9/2025).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya transisi energi menuju sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara.

Dalam kunjungannya di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (11/9), Sugeng menyoroti potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia yang diperkirakan bisa mencapai 3.000 Gigawatt (GW). Ia mencontohkan PLTS di Jakabaring, yang dibangun pada 2018 untuk mendukung Asian Games, sebagai salah satu best practice pemanfaatan energi surya di tanah air.

Sugeng menjelaskan, penggunaan energi fosil saat ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi.

Ekosistem Energi Terbarukan Harus Diperkuat

Karena itu, DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan energi bersih sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement 2015, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Meski potensinya besar, ia berujar, PLTS juga memiliki keterbatasan, terutama karena sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Produksi listrik optimal hanya bisa dicapai sekitar pukul 11.00–14.00. Selain itu,

Sugeng menyoroti harga jual listrik dari PLTS yang saat ini dipatok Rp 889 per kWh. Ia meminta agar harga tersebut ditinjau kembali, mengingat secara keekonomian biaya produksi bisa mencapai Rp 1.600 per kWh.

Sejauh ini, ia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam konsumsi listrik per kapita, yakni sekitar 1.400 kWh, jauh di bawah Singapura (8.000 kWh) maupun Brunei (9.000 kWh). Karena itu, DPR mendorong peningkatan elektrifikasi di berbagai sektor, termasuk transportasi dan rumah tangga, dengan memastikan sumber listrik berasal dari energi bersih dan terjangkau. **srw/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jaga Pasokan Listrik Nasional

Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Kota Cilegon, Banten, Kamis (11/9). Dengan kapasitas sekitar 6.000 MW, PLTU Suralaya menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara sekaligus penopang utama pasokan listrik di Jawa hingga Bali.

“PLTU Suralaya ini menyuplai sekitar 20% kebutuhan listrik Jawa Bali, khususnya untuk kawasan industri Banten serta wilayah Jabodetabek. Maka, keberlangsungan operasionalnya sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” ujar Putri Zulkifli Hasan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dengan keberlanjutan lingkungan. Pihak PLTU memaparkan penggunaan teknologi co-firing biomassa dan pengolahan sampah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Tujuannya agar ketahanan energi pembangkit listrik

PLTU Suralaya ini menyuplai sekitar 20% kebutuhan listrik Jawa Bali, khususnya untuk kawasan industri Banten serta wilayah Jabodetabek

ini juga diiringi dengan ekosistem yang baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Hasil kunjungan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja Lingkungan Hidup, guna memastikan PLTU Suralaya mampu terus mendukung kebutuhan energi nasional tanpa mengabaikan aspek lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. — **adi/aha**



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, Kamis (11/9/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: ADI/PDT

Program Layanan Hukum Harus Mudah

Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan bahwa program-program pelayanan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah haruslah berjalan on

program yang dijalankan betul-betul *on the track* sesuai dengan rencana dan dalam koridor yang telah ditentukan, serta berdampak positif untuk masyarakat,” katanya kepada **Parlementaria** usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XIII di Semarang, Jawa Tengah,

bisa membawa dampak positif dan manfaat yang besar untuk masyarakat Jateng khususnya di 35 Kabupaten/Kota di Jateng.

“Dan juga layanan-layanan hukum lainnya, seperti notaris dan lain-lainnya tentunya kami harapkan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor yang berlaku. Jadi anggaran yang sudah dialokasikan di kanwil ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena ke depan anggaran sudah kami tambah demi terlaksananya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian



Anggota Komisi XIII DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XIII di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).

the track sesuai dengan rencana. Sehingga, hal ini berdampak agar masyarakat menjadi mudah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

“Kami (Komisi XIII DPR RI) melakukan fungsi pengawasan ke Kanwil Kementerian Hukum agar

Jumat (12/9).

Ia melanjutkan, terkait dengan layanan-layanan hukum untuk masyarakat baik itu fisik maupun daring juga dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Komisi XIII DPR RI mendukung dan mendorong agar Kanwil Jateng betul-betul

Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembenahan atas masukan-masukan dari Komisi XIII DPR RI, ke depan semua kebijakan akan lebih berfokus kepada pelayanan untuk masyarakat Jateng. **cas/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



RUU Transportasi Online Masuk Prioritas 2026



FOTO: GER/PDT

Ketua Bales DPR RI, Bob Hasan saat rapat pleno bersama para pimpinan komisi untuk membahas Prolegnas Prioritas 2025–2026 di Ruang Bales, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Badan Legislasi (Bales) DPR RI menggelar rapat pleno bersama para pimpinan komisi untuk membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026 di Ruang Bales, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9). Agenda rapat difokuskan pada evaluasi Prolegnas 2025, usulan prioritas 2026, serta sinkronisasi Prolegnas jangka menengah 2025–2029.

Ketua Bales DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menyentuh kepentingan publik dipastikan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Salah

satunya adalah RUU Transportasi Online.

“Transportasi online masuk ke 2026, prioritas 2026, ya nggak mungkin lagi kan kalau tidak masuk. Selain itu, ada juga RUU Pelindungan Pekerja Lepas dan RUU Pekerja Platform,” ujar Bob.

Bob menjelaskan, percepatan pembahasan Prolegnas dilakukan lebih awal dari biasanya. Bila sebelumnya penetapan prioritas dilakukan pada November, kali ini diputuskan pada September.

Selain agenda 2026, Bales juga memastikan RUU Perampasan Aset akan diprioritaskan pada 2025, mengingat urgensinya dalam memperkuat pemberantasan tindak

pidana korupsi dan pencucian uang.

Dari pihak pemerintah, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan 17 usulan RUU untuk Prolegnas Prioritas 2026. Beberapa di antaranya adalah RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Pengelolaan Ruang Udara, RUU Hukum Perdata Internasional, RUU Desain Industri, serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Dengan berbagai usulan yang masuk, Bales DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan regulasi yang mendesak dan agenda jangka panjang pembangunan hukum nasional. **ssb/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Kunjungan Komisi VI DPR RI ke PT Pusri, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/9).

Foto: ayu/bia



Caption: Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI ke area operasional PT Vale di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu (17/9). Foto: ica/bia



DARI RUANG SIDANG

TAYANG SETIAP HARI

SAKSIKAN HANYA DI:

<https://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID>



TVR PARLEMEN

TVR
PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri